



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.14, No.1, Juni 2017

TRANSFORMASI IDENTITAS KEINDONESIAAN

- Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru
- Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia
- Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) dalam Pemilu Pilkada DKI 2012
- Peranakan dan Serat Kekancangan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta
- Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan

RESUME PENELITIAN

- Peran Kerja sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN
- Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan

REVIEW BUKU

- Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 14	No. 1	Hlm. 1-108	Jakarta, Juni 2017	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Devi Darmawan, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

1829-8001
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru Aisah Putri Budiatri	1–15
• Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia Wasisto Raharjo Jati	17–29
• Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI): dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 Dina Fadiyah	31–44
• Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta Septi Satriani	45–54
• Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan Siswanto	55–68
Resume Penelitian	
• Peran Kerja Sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN Sandy Nur Ikfal Raharjo, dkk	69–83
• Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan Siswanto, dkk	85–98
Review Buku	
• Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan Anggi Afriansyah	99–106
Tentang Penulis	107–108
Pedoman Penulisan	109–113

CATATAN REDAKSI

Arus Globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perubahan tersebut bisa bernilai positif jika globalisasi dimaknai secara bijak. Namun tak sedikit dampak negatif ditimbulkan oleh globalisasi akibat ketidakmampuan kita dalam memaknai dan menanggapi secara bijak. Indonesia, tak lepas dari arus globalisasi ini sehingga pola-pola perilaku masyarakat di segala aspek kehidupan pun bergeser. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergeseran identitas manusia baik itu akibat sosial-budaya maupun politik.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan identitas Keindonesiaan. Artikel pertama yang ditulis oleh Aisah Putri Budiatri, "Dikotomi Identitas Keindonesiaan Dan Kepapuaan Pasca Orde Baru", memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Artikel berikutnya, "Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia". Artikel yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati ini membahas mengenai kelas menengah yang menjadi aktor baru dan menjadi identitas tersendiri dalam demokrasi di Indonesia. Tulisannya membahas mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Dan sejauh mana mereka ikut andil dalam proses demokratisasi di ruang publik. Sementara itu, artikel "Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara Dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012" yang ditulis oleh Dina Fadiah menawarkan diskusi mengenai relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-

Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas menjadi identitas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

Pergeseran identitas juga terjadi di Kraton Yogyakarta yang dibahas dalam artikel "Peranakan Dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta" yang ditulis oleh Septi Satriani. Artikel ini membahas bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Artikel terakhir membahas tentang "Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan" yang ditulis oleh Siswanto. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan

bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Selain kelima artikel terkait identitas di atas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama ditulis oleh Sandy Nur Iqbal Raharjo, “Peran Kerja Sama IMT-GT Dalam Pembangunan Konektivitas Asean”. Tulisan ini menganalisis arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim.

Artikel kedua, “Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan”, ditulis oleh Siswanto. Artikel ini mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerjasama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (asymmetric power relations) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (bargaining position) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (nasional power) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia

sebagai negara kekuatan menengah (middle power) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Fathur Rokhman & Surahmat “Bahasa Sebagai Arena Dan Instrumen Kekuasaan”. Review yang ditulis Anggi Afriansyah menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai identitas Keindonesiaan. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

DDC: 320.54 : 352.14

Aisah Putri Budiatri

DIKOTOMI IDENTITAS KEINDONESIAAN DAN KEPAPUAAN PASCA ORDE BARU

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 1-15

Narasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Kata kunci: identitas, Papua, kepapuaan, keindonesiaan, konflik, paska Orde Baru

DDC: 305.5

Wasisto Raharjo Jati

MEMAKNAI KELAS MENENGAH SEBAGAI AKTOR DEMOKRASI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 17-29

Tulisan ini hendak menganalisis mengenai kelas menengah sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Membicarakan kelas menengah dalam setiap diskursus ilmu sosial dan politik di Indonesia senantiasa dihadapkan pada pembahasan ekonomi secara kuantitatif. Hal yang perlu dicatat adalah keberadaan kelas menengah ini daripada didefinisikan lebih baik dirasakan keberadaannya dalam kehidupan. Posisi kelas menengah sebagai aktor politik di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan kemunculan kelas menengah dalam arus demokrasi Indonesia yang masih ambigu. Kelas menengah ini bisa menjadi kelompok masyarakat yang ter subordinasi dengan negara, namun di satu sisi, kelas menengah juga tampil sebagai kelas masyarakat yang resisten dengan negara. Adanya transisi posisi dan status kelas menengah tersebut sebenarnya bisa disimak dari gerakan reformasi 1998 hingga sekarang ini. Munculnya berbagai macam gerakan politik dengan mengarustamakan demokrasi yang diinisiasi oleh kelas menengah menjadi hal yang terelakkan pasca reformasi ini. Semula, gerakan tersebut hanya berupa aksi penyampaian aspirasi dan kini sudah berkembang menjadi menjadi aksi penuntutan representasi. Adanya perubahan dalam pilihan aksi dan strategi itu menandakan bahwa kesadaran politik di kalangan kelas menengah Indonesia sendiri sudah semikian merata. Mereka tidak hanya menjadi aktor pasif secara politis namun juga aktif dalam menyuarakan aspirasi dan sekaligus pula representasinya. Menguatnya aksi representasi dari kelas menengah ini merupakan implikasi penting semakin menguatnya ranah societal terhadap

proses political, dan semakin berperannya netizen dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana mereka andil dalam proses demokratisasi di ruang publik.

Kata kunci: Demokratisasi, Kelas Menengah, Masyarakat

DDC: 324.6

Dina Fadiyah

**KUASA MERAH SUARA: RELASI
FOKE-NARA DAN FORUM
KOMUNIKASI ANAK BETAWI
(FORKABI) DALAM PEMILUKADA
DKI JAKARTA 2012**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 31-44

Tulisan ini bermaksud melihat relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilu DKI Jakarta 2012. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai tim suksesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-mana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

Kata kunci: Ormas, Forkabi, Patron, Klien

DDC: 302.3

Septi Satriani

**PERANAKAN DAN SERAT
KEKANCINGAN: SEBUAH
IDENTITAS ABDI DALEM KRATON
YOGYAKARTA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 45-54

Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Kata kunci : Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan

DDC: 320.509598

Siswanto

**TRANSFORMASI PANCASILA DAN
IDENTITAS KEINDONESIAAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 55-68

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin lama semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi

atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Kata kunci: Globalisasi, Identitas Keindonesiaan, Transformasi Pancasila

DDC: 327

Sandy Nur Ikfal Raharjo

PERAN KERJA SAMA IMT-GT DALAM PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS ASEAN

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 69-83

Indonesia-Malaysia—Thailand Growth Triangle (IMT-GT) merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang diakui oleh ASEAN berperan penting dalam membangun konektivitas ASEAN. Namun demikian, perbedaan karakter geografis dan perbedaan kepentingan antartiga negara anggotanya berpeluang menghambat implementasi IMT-GT dalam membangun konektivitas tersebut. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yaitu arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim. Melalui metode kualitatif bersifat deskriptif korelatif, studi ini menemukan bahwa IMT-GT berkontribusi hampir 50% bagi perekonomian Malaysia, mendukung visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia, serta mendorong kemajuan wilayah Thailand Selatan yang relatif tertinggal. Temuan lainnya, capaian program IMT-GT 2012-2016 masih rendah, terutama di sisi Indonesia akibat terlalu banyaknya program yang dicanangkan. Terakhir, IMT-GT berperan dalam membangun konektivitas ASEAN melalui pengembangan lima koridor ekonomi, walaupun masih lebih dominan pada dimensi darat dibanding dimensi maritim.

Kata kunci: ASEAN, IMT-GT, konektivitas, dan maritim

DDC: 327.51

Siswanto

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK: MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL DI TENGAH KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 85-98

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembarakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (*asymmetric power relations*) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (*nasional power*) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan. Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.

Kata kunci: Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional

DDC: 302.222

Anggi Afriansyah

**BAHASA SEBAGAI ARENA DAN
INSTRUMEN KEKUASAAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 99-106

Buku ini menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Kata kunci: bahasa, politik, kekuasaan, Indonesia

DDC: 320.54 : 352.14

Aisah Putri Budiatri

THE DICHOTOMY OF INDONESIAN AND PAPUAN IDENTITIES IN THE POST-NEW ORDER ERA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 1-15

The narratives about the dichotomy of Indonesian and Papuan identities are almost founded in every analysis of Papuan political identity. The previous research emphasis on the discussion about the Dutch colonial experience, the history of Papua's integration into Indonesia and the failure of development under New Order era as the key reasons for the genesis of the dichotomy. The colonial periode and New Order era have become their research focus since the Papuan identity as an antithesis of Indonesian-ness was born and grew under this political period. Then, how is about the political identities in Papua under Post-New Order? This article shows that the antithesis dichotomy between Papuan and Indonesian identities still occurs, even though several policies to resolve the conflict, including the Special Autonomy Law, have been implemented. In fact, the dichotomy of identities in Papua has sharpened and potentially worsened the conflict.

Keywords: *identity, Papua, Papuan-ness, Indonesian-ness, conflict, post-New Order*

DDC: 305.5

Wasisto Raharjo Jati

UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY

PILLAR IN INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 17-29

This article is aims to analyse middle class as one of the main actors in Indonesian democratization process. Discussion on middle class studies in Indonesian social and political science discourse have been dominated economic understanding based quantitative method. It was an academic challenges for Indonesian social scientist to redefine terminology of middle class. The position of middle class as the political actor in Indonesia still fluctuated due to unclearly standing in terms of relation state and society. On one hand, the middle class could perform as resistant groups against the political regime. In other hand, the Indonesian middle class presumably become subordinated groups towards the political regime. It can be indicated in Indonesia post Authoritarian era, the middle class groups performs itself as the political initiator from grass roots level. That main motivation from Indonesian middle class in recent political era are make alternative representation in order to articulate aspiration. The emergence of internet especially social media have been perceived as political machine that stimulated middle class to make critical points toward government today.

Keyword: *Democratization, Middle Class, Society.*

DDC: 324.6

Dina Fadiyah

UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY PILLAR IN INDONESIA

This paper intends to see the relationship between Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) with Forkabi in Jakarta 2012 Election. Basically, Forkabi stand up because they felt treat from immigrants. Forkabi originally founded on ethnicity but later transformed into a political extension of a local elite. CSOs that were supposed to be free of political interests, became the political extension of Foke-Nara during the campaign period in the 2012 Jakarta Governor election. This paper uses descriptive qualitative method and found that community organizations can play an important role in a local election. Proven with the local elites are currently aggressively used organizations as the tim to win the election. The success of this case because members of mass organizations are widespread everywhere. Starting from the level of RT, RW, Village, District, etc. This proves that the existing mass organizations can not be independent or do not have political interest.

Keywords: Mass Organization, Forkabi, Patron, Client.

DDC: 302.3

Septi Satriani

**PERANAKAN AND SERAT
KEKANCINGAN: AN IDENTITY OF
“ABDI DALEM” IN YOGYAKARTA
PALACE**

This paper focus on how the concept of peranakan and serat kekancingan became the identity of abdi dalem of Kraton Yogyakarta. Peranakan is not just a uniform but the symbol of brotherhood and control of behavior. I assume that the peranakan and serat kekancingan is a symbol of identity. When the abdi dalem wearing a peranakan and having serat kekancingan,, they will behave according to the value that contained by them.

Keywords: Identity, Abdi Dalem in Yogyakarta Palace, Peranakan, Serat Kekancingan

DDC: 320.509598

Siswanto

**THE TRANSFORMATION OF
PANCASILA AND INDONESIAN
IDENTITY**

The ideology of Pancasila as the basis of the state and the worldview is increasingly abandoned by the Indonesian nation. Pancasila as a reference of political and social life is weakening in the midst of globalization that influence the mindset and behavior of the Indonesian people. Therefore, the people of Indonesia move to the condition that they lost of Indonesian Identity. This paper sees the importance of discourse about transformation of Pancasila, so that it is expected to be a solution to the challenge of nationality. Transfromasi Pancasila can be done through (1) Transformation is holistic, can not be partial. (2) Transformation also involves about changing the mindset of the community. (3) This transformation also needs to be grounded by the light of science.

Keywords: Globalization, Indonesia Identity, Transformation of Pancasila

DDC: 327

Sandy Nur Ikfal Raharjo

**THE ROLE OF IMT-GT
COOPERATION IN THE ASEAN
CONNECTIVITY DEVELOPMENT**

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) is recognized as one of the sub-regional cooperation to support ASEAN Community. However, geographical character differences and consequently creating different interests among three member states, is likely to hinder the implementation of the IMT-GT in establishing such connectivity. This study focuses on three issues, namely, the significance of IMT-GT for each member state, implementation of IMT-GT's programs in 2012-

2016, and the role of IMT-GT in building ASEAN connectivity, particularly in the maritime sector. Through correlative descriptive qualitative method, this study found that the IMT sub-region contributes nearly 50% for the Malaysian economy, supports the Indonesian vision of Global Maritime Fulcrum for Indonesia, as well as encourages the development of less-developed Southern Thailand region. In Addition, the implementation of IMT-GT's programs in 2012-2016 was still low, especially on the side of Indonesia due to too many programs were planned. Another finding was that IMT-GT has played significant role in building the ASEAN connectivity through the development of five economic corridors, although it was still more on land connectivity rather than maritime connectivity.

Keywords: ASEAN, IMT-GT, connectivity, and maritime

DDC: 327.51

Siswanto

**INDONESIAN FOREIGN POLICY
TOWARD CHINA:
FIGHTING THE NATIONAL
INTERESTS IN ASYMMETRIC
POWER RELATIONS**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 85-98

This paper would like to describe Indonesia's foreign policy towards China in the Reform period. As we known that Indonesia-China bilateral relations have been going on since the 1950s. The relations have ups and downs condition in accordance with the dynamics of domestic politics of each country. It is exciting that in Reform period that bilateral cooperation has been increasing especially in the field of politics and economy. In other hand, there is obstacle in this bilateral cooperation. The cooperation based on imbalance power relation (asymmetric power relations) which will affect to the bargaining position of each country in struggling for national interests. China as a nation with greater national power will be easier in fighting for its national interests compared to Indonesia as a country with smaller national power. To solve the obstacle, Indonesia's position as a middle power country can be a strategic instrument in facing China. Position as an middle power is based on a number of identifications of its capacity and political behavior in international relations

such as ; a diplomatic initiator in realizing stability / security and peace in the region. Finally, in closing remark that this paper is expected to give input to the direction of Indonesian foreign policy towards China so that it has more bargaining position in fighting its national interests against China in the midst of imbalance power (asymmetric power relations)

Keywords: Foreign policy, power imbalance, national interest

DDC: 302.222

Anggi Afriansyah

**LANGUAGE AS FIELD AND
INSTRUMENTS OF POWER**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 99-106

This book examines the use of language in variety aspects of life. Language is not only used as a medium of communication but more than that, can be an effective tool to gain power. Language operates as an instrument of power and successfully utilized optimally by those who have the intention to to get power. Language can be used to dominate others, means of struggle, preserve power, won the election, and achieve economic benefits.

Keywords: Language, politic, power, Indonesia

REVIEW BUKU
BAHASA SEBAGAI ARENA DAN INSTRUMEN KEKUASAAN

BOOK REVIEW
LANGUAGE AS FIELD AND INSTRUMENTS OF POWER

Anggi Afriansyah

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: afriansyah.anggi@gmail.com

Judul Buku : Politik Bahasa Penguasa
Pengarang : Fathur Rokhman & Surahmat
Tahun Terbit : 2016
Tebal : xiv + 298 halaman
Penerbit : Penerbit Buku Kompas

Diterima: 12 April 2017; direvisi: 14 April 2017; disetujui: 30 Juni 2017

Abstract

This book examines the use of language in variety aspects of life. Language is not only used as a medium of communication but more than that, can be an effective tool to gain power. Language operates as an instrument of power and successfully utilized optimally by those who have the intention to to get power. Language can be used to dominate others, means of struggle, preserve power, won the election, and achieve economic benefits.

Keywords: *Language, politic, power, Indonesia*

Abstrak

Buku ini menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Kata kunci: bahasa, politik, kekuasaan, Indonesia

Pendahuluan

Secara linguistik yang dimaksud bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri¹.

Namun, bahasa sudah melampaui fungsi linguistiknya tersebut. Bahasa telah menjadi alat yang efektif untuk meraih beragam tujuan dalam semua segi kehidupan manusia. Bahasa merupakan pemahaman manusia mengenai struktur sosial pada tempat dia hidup dan tinggal. Manusia memiliki semua pengetahuan yang kompleks dan tak terucapkan mengenai relasi-relasinya dengan lingkungan sekitarnya. Bourdieu memandang bahwa keseluruhan

¹ Harimurti Kridalaksana, *Bahasa dan Linguistik*, dalam Kushartanti, dkk (Editor), *Pesona Linguistik, Langkah Awal Memahami Linguistik*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2007), hlm. 3.

komunikasi manusia dilihat sebagai *language games*, yaitu seluruh proses penggunaan kata (dan juga bahasa) sebagai sebuah bentuk permainan. Wittgenstein menyatakan bahwa bahasa merupakan *game* yang memiliki aturan main yang disepakati antara sesama pemain. Dalam pandangan Bourdieu, bahasa dilihat sebagai keterlibatan sekelompok orang dalam sebuah aktivitas sosial. Kekuasaan merupakan tujuan utama dalam setiap relasi sosial dan setiap relasi sosial, dan selalu terdapat pertarungan-pertarungan yang tujuan akhirnya adalah memperoleh kekuasaan. Dalam konteks relasi sosial, bahasa memiliki sifat *language arbitrary* yaitu tidak adanya persamaan antara aturan gramatikal dengan maknanya, namun yang lebih penting adalah tujuan makna tersebut. Dalam konteks ini bahasa lebih menunjukkan kekuasaan simbolik.²

Buku berjudul *Politik Bahasa Penguasa* karya Fathur Rokhman dan Surahmat menjadi salah satu kajian penting yang menunjukkan penggunaan bahasa sebagai salah satu piranti kekuasaan yang efektif. Pendekatan sosiolinguistik dan pragmatik digunakan untuk membedah masalah kebahasaan yang muncul di masyarakat. Kajian teoretis dalam buku ini dipadukan dengan berbagai analisis praktis terhadap fenomena kebahasaan yang mutakhir di berbagai bidang. Buku ini menurut penulis disusun untuk memperlihatkan bahwa bahasa telah menjadi arena sekaligus alat kuasa di berbagai bidang. Hubungan manusia dengan sesamanya dalam pandangan penulis telah berkembang menjadi relasi kekuasaan. Pada pengantarnya penulis menyatakan bahwa kajian lintas bidang yang menjadikan bahasa sebagai objek telah banyak tersedia. Misalnya, untuk memahami ontologis bahasa berkembang filsafat bahasa yang dipelopori oleh Wittgenstein. Kemudian, untuk memahami penggunaan bahasa dalam situasi dan masyarakat tutur, hadir bidang kajian sosiolinguistik yang dipelopori John R. Searle. Selanjutnya, untuk memahami bahasa

sebagai sistem tanda dikaji oleh Paul Ricouer dalam bidang kajian semiotika³.

Buku ini melengkapi kajian mengenai politik bahasa yang sudah dibahas pada beberapa kajian sebelumnya. Di Indonesia sudah ada beberapa kajian yang tidak hanya menempatkan bahasa dalam telaah linguistik semata tetapi juga menjadi piranti yang cukup efektif dalam menunjang keberlangsungan rezim yang berkuasa. Kajian Daniel Dhakidae Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) misalnya pada beberapa babnya membedah bagaimana rezim Orde Baru menggunakan bahasa sebagai alat yang ampuh untuk melanggengkan kekuasaannya. Pasca reformasi, kajian Wijoyo dkk (2004) melakukan kajian semiotik atas teks-teks pidato Presiden Soeharto dan Selebaran Mahasiswa yang ada pada saat gerakan reformasi. Pada buku ini penulis mengajukan dua belas tema kajian dari penggunaan bahasa di berbagai bidang mulai dari politik, ekonomi, hukum, pers, agama dan pendidikan. Selain itu penelaahan pada buku ini mengambil *setting* Orde Lama, Orde Baru dan reformasi.

Pada buku ini penulis dengan merujuk beragam literatur dan kajian yang sudah tersedia menengahkan beragam posisi bahasa mulai dari penggunaannya dalam praktik dominasi dan alat propaganda kaum tiran, digunakan oleh para pejuang untuk memperjuangkan ide-ide mereka tentang Indonesia merdeka, digunakan oleh suatu rezim untuk memudahkan langkah-langkahnya dalam meraih dan mempertahankan kekuasaannya dan di era saat ini bahasa juga efektif untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya demi memenangkan kampanye elektoral. Bahasa dalam beberapa segi menjadi sangat efektif untuk memengaruhi diskursus yang ada di masyarakat. Dengan menggunakan bahasa masyarakat dihegemoni untuk mengikuti cara pandang penguasa dalam berbagai bidang kehidupan

² Muridan Wijoyo & Marsudi Noorsalim (editor), *Bahasa Negara versus Bahasa Gerakan Mahasiswa: Kajian Semiotik atas Teks-teks Pidato Presiden Soeharto dan Selebaran Gerakan Mahasiswa*. (Jakarta: LIPI Press, 2004), hlm. 10.

³ Fathur Rokhman & Surahmat, *Politik Bahasa Penguasa*, (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. vii.

Politik Bahasa Penguasa

Tidak ada hubungan antar manusia yang lebih langgeng dari hubungan kekuasaan. Kekuasaan hadir dalam setiap interaksi. Kekuasaan adalah kemampuan dan pengakuan yang dimiliki subjek untuk menggerakkan dan mengarahkan subjek lain untuk tujuan tertentu. Foucault menyatakan bahwa kekuasaan tak hanya terjadi dalam relasi penguasa dan rakyat tetapi juga terjalin pada setiap hubungan. Ciri dari kekuasaan itu tersebar, tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak represif tetapi produktif dan melekat pada kehendak untuk mengetahui⁴. Kekuasaan dalam perspektif Foucauldian bermakna tidak total, tidak utuh, hadir di mana-mana *omnipraesens*; menyebar dan tidak sentralistik sehingga subjek-diri yang memiliki keahlian diskursif mampu mengendalikan kekuasaan⁵. Menurut Foucault, kekuatan adalah sebuah dinamika dalam memproduksi dan mengobservasi kenyataan atau realitas. Konsep dan pengetahuan menjadi praktik diskursif dan/atau praktik bahasa. Yang dominan adalah sesuatu yang menjadi dominan melalui penciptaan pendapat-pendapat, konsep-konsep, dan pengetahuan terhadap yang penting dalam masyarakat. Bahasa, bagi Foucault menjadi *formula of domination*. Formula ini tidak hanya mendefinisikan yang normal, tetapi juga yang dianggap menyimpang sebagai objek⁶.

Manusia memiliki relasi kekuasaan yang lebih rumit dari sekadar kuat dan lemah. Karena manusia memiliki akal budi, mereka memiliki kriteria yang kompleks soal kehidupan bersama yang diidamkan. Manusia juga senang menggunakan simbol. Relasi kuasa sering kali terwujud dalam bentuk simbol⁷. Marcuse dalam Saeng mengungkap bahwa sebagai sistem simbol, bahasa digunakan oleh para penguasa untuk merawat kekuasaannya. Hal

⁴ Fathur Rokhman & Surahmat, *Politik Bahasa Penguasa*., hlm 48.

⁵ Hamzah Fansuri, *Sosiologi Indonesia: Diskursus Kekuasaan dan Reproduksi Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 2015), hlm. 12.

⁶ Lucien Vanliers, *Memutus Rantai Kekerasan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 57.

⁷ Fathur Rokhman & Surahmat., hlm 64.

tersebut digunakan melalui pengendalian nalar publik dengan wacana yang berciri absolut. Konstruksi bahasa absolut dan anti oposisi merupakan langkah maju dan baru dalam strategi perbudakan dan penghisapan. Kemajuan dan kebaruan berhubungan dengan struktur batin dan nalar yang menduduki posisi kunci dan hakiki dalam keberadaan individu. Kesadaran ini mendorong penguasa memberdayakan bahasa dalam sejumlah upaya politiknya⁸. Antonio Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana pola relasi yang terjadi antara penguasa dengan masyarakat yang didominasi. Hegemoni menurut pandangan Gramsci bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis⁹.

Hitler melalui Paul Joseph Goebbels menggunakan departemen propagandanya yang sangat berpengaruh dalam memuluskan tujuan untuk membangkitkan keagungan Jerman dan ras Aria. Teknik propagandanya yang sangat terkenal adalah *argentum ad nauseam* atau teknik *big lie* (kebohongan besar, yaitu menyebarkan berita bohong melalui media masa sebanyak mungkin dan sesering mungkin hingga kebenaran tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran.¹⁰ Korea Utara menggunakan tulisan, poster, buku, film, dan tayangan televisi agitatif untuk membuat kepatuhan warganya. Strategi kultural tersebut sudah dijalani sejak era Kim Il Sung, Kim Jong Il, hingga Kim Jong Un saat ini. Gill Menjelaskan bahwa pada era Kim Il Sung propaganda dijalankan untuk membangun kecintaan fanatis kepada negara dengan maksud membuat negara semakin kuat. Ia memanipulasi berita di media untuk membangun persepsi publik tentang keulungannya berperang dan mengurus negara. Informasi tersentral di pemerintah dan kontrolnya sangat kuat. Kondisi tersebut masih bertahan sampai saat ini.¹¹ Contoh lainnya adalah ketika Belanda menjajah Afrika Selatan. Selain

⁸ Fathur Rokhman & Surahmat., hlm 66

⁹ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004), hlm. 19.

¹⁰ Fathur Rokhman & Surahmat., hlm. 67

¹¹ Fathur Rokhman & Surahmat., hlm 69-70

menggunakan kekuatan militer, Belanda juga melakukan kerja-kerja kultural untuk mendukung agenda kolonialisasinya.

Bahasa menjadi salah satu instrumen yang bisa digunakan secara efektif oleh pemerintah kolonial untuk mendominasi masyarakat jajahan secara halus. Ada dua tahapan bagaimana kolonisasi bahasa dilakukan. Menurut Calvet, pertama, tahap vertikal ketika bahasa disebarkan kepada warga kelas atas masyarakat yang terjajah. Kedua dilakukan tahapan horizontal, ketika warga kelas atas bergerak menyebarkan bahasa kolonial secara geografis dari ibu kota hingga kota-kota dan desa-desa kecil. Selain itu menggunakan sistem pendidikan untuk menanamkan ideologi asimetris sehingga logika asimetris terrepresentasi dalam praktik berbahasa. Untuk mendiskriminasi misalnya Belanda menggunakan sebutan *inlander* untuk warga pribumi. Secara leksikal *inlander* bernuansa netral yang berarti penduduk asli. Maknanya kemudian berubah menjadi negatif karena memang sengaja digunakan Belanda untuk mendiskriminasi. Istilah ini dicetuskan pada 1854 pada undang-undang kolonial untuk menyamakan beragam penduduk asli yang ada di nusantara. Sebutan yang digunakan untuk menguatkan rezim segregasi Belanda. Belanda ketika itu menggunakan tiga tingkat yaitu Eropa, golongan timur asing, dan masyarakat asli nusantara atau *inlander*.¹² Berbeda dengan Belanda, Jepang punya strategi tersendiri agar tujuan mereka menduduki nusantara berhasil. Klaim sebagai “saudara tua” merupakan strategi ampuh Jepang dalam menguasai negeri ini. Melalui klaim tersebut Jepang berhasil mencitrakan diri sebagai sosok yang lebih tua, lebih kuat, dan siap ngemong. Dalam persepsi masyarakat Jawa, saudara tua atau kakang merupakan sosok yang mengayomi, memberikan keteduhan, dan melindungi¹³.

Narasi sejarah tersebut menjadi beberapa bukti bagaimana bahasa menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif untuk melanggengkan kekuasaan dan mendominasi kelompok subordinat. Bahasa dalam pandangan Bourdieu bukan hanya sekedar alat komunikasi.

Bahasa lebih dari itu karena bisa juga digunakan sebagai instrumen tindakan dan kekuasaan. Komunikasi merupakan pertukaran bahasa yang berlangsung sebagai hubungan kekuasaan simbolis di mana terwujud antara hubungan kekuatan antara pembaca dan mitra atau lawan bicara dalam suatu komunitas. Hubungan sosial adalah hubungan dominasi yang ditandai oleh interaksi simbolis, komunikasi melibatkan pengetahuan dan kekuasaan¹⁴.

Bahasa dalam Arena Politik

Baik dalam perspektif komunikasi maupun politik, bahasa dipandang sesuatu yang sangat vital. Menjalin hubungan yang komunikatif dengan publik atau pihak lainnya merupakan keniscayaan bagi aktor politik. Pada era pergerakan para *founding fathers* dan *mothers* melawan pemerintah kolonial menggunakan beragam strategi baik itu konfrontasi maupun kooperasi. Penggunaan bahasa di era ini pun memegang peranan signifikan. Mereka menggunakan bahasa lisan ataupun tulisan untuk membangkitkan semangat masyarakat yang lebih luas. Mereka menggunakan radio atau pun panggung untuk orasi di depan publik ataupun melalui bahasa tulisan di koran atau mural di tembok-tembok. Kemampuan berbahasa betul-betul dioptimalkan oleh para *founding fathers* dan *mothers* untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Beberapa contoh yang menggambarkan penggunaan bahasa yang efektif dalam membakar semangat masyarakat adalah pidato Bung Tomo pada pertempuran 10 November di Surabaya. Ada juga Affandi dan Chairil Anwar yang berkolaborasi menciptakan poster “Boeng, Ajo Boeng”. Dan Ki Hajar Dewantara yang menulis *Als ik een Nederlander was* (Seandainya Aku Seorang Belanda) yang menimbulkan kekesalan dari pemerintah kolonial.¹⁵ Ki Hajar Dewantara menuliskan esai tersebut di surat kabar *De Express* edisi 19 Juli 1931. Esai tersebut menjadi esai politik yang paling kontroversial. Pada esainya ia mengkritik pemerintah kolonial yang meminta sumbangan dari masyarakat yang

¹² Fathur Rokhman & Surahmat., hlm 77

¹³ Fathur Rokhman & Surahmat., hlm. 78

¹⁴ Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 71.

¹⁵ Fathur Rokhman & Surahmat., hlm 135

dijajahnya untuk membiayai pesat peringatan kemerdekaan Belanda. Ki Hajar Dewantara harus ditahan dan diinterogasi karena tulisannya tersebut¹⁶.

Pemerintah Orde Baru menggunakan instrumen bahasa secara efektif untuk merawat dan memanjangkan kekuasaannya. Kekuasaan memang tak selalu dalam bentuk yang represif dan penuh kekerasan. Kekuasaan juga bisa berbentuk yang paling produktif yaitu menggunakan produksi wacana-wacana tertentu. Dalam padangan Dhakidae, pemerintah Orde Baru memainkan kekuasaan secara produktif dalam menciptakan bahasanya sendiri. Menurutnya kekuasaan berekspresi melalui bahasa khususnya pada penggunaan akronim, eufimisme, dan disfemisme. Ketiganya adalah teknologi di mana kekuasaan beroperasi dari tingkat tinggi maupun rendah. Dalam pergulatan tersebut ada dominasi dan resistensi. Terjadi diskursus kekuasaan di mana bahasa menjadi inti permainan. Bahasa mengatur strategi, dan taktik juga perlawanan. Bahasa menentukan menang atau kalah dan akibat dari keduanya. Bahasa menghadirkan kekuasaan dan kekuasaan menghadirkan bahasa. Bahasa dan kekuasaan menciptakan realitasnya sendiri¹⁷. Kleden menjabarkan bahwa pemerintah Orde Baru mampu membedakan dirinya dengan pemerintah Soekarno dengan menyatakan bahwa *nation building* Orde Lama yang berwawasan politik harus diganti dengan pembangunan nasional yang berwawasan ekonomi¹⁸.

Dalam buku ini, penulis juga mengulas bagaimana bahasa digunakan di arena politik pasca reformasi. Salah satu bahasanya adalah pertarungan politik yang terjadi pada pemilihan Presiden 2014 lalu. Misalnya kedua kandidat menggunakan pronominal secara optimal. Dalam kajian mengenai kelas kata, pronomina sering dimaknai sebagai kata ganti. Ada empat jenis pronominal yaitu pronominal orang (persona), pronominal milik, pronomina petunjuk, dan pronominal penghubung. Pronomina persona

¹⁶ Savitri Prastiti S, *Keselarasan dan Kejangggalan. Pemikiran-pemikiran Priyai Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 91.

¹⁷ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 361.

¹⁸ Hamzah Fansuri., hlm. 61

seperti saya, kita, kami, dan mereka merupakan pronominal yang paling sering digunakan dalam wacana politik. Pronomina dapat digunakan untuk menunjukkan keberpihakan pada hal tertentu. Menggunakan pronominal yang tepat, seorang politisi berusaha untuk mengidentifikasi posisi dirinya di antara mitra tuturnya. Mereka dapat membangkitkan perasaan dekat dengan para konstituen. Pada pemilihan presiden tahun 2014 pronomina kita yang paling banyak digunakan oleh dua kandidat yang sedang berkontestasi. Prabowo menggunakan ungkapan “kalau bukan sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi”. Sedangkan Jokowi menggunakan *tagline* “Jokowi adalah kita”. Semua *tagline* tersebut disebarakan melalui pidato, baliho, spanduk, dan *leaflet*. Pronomina kita memiliki keunggulan karena menyatakan kemenyatuan antara penutur dan mitra tutur. Dengan pronomina kita, penutur secara performatif menyatakan bahwa dirinya berada di pihak yang sama dengan mitra tuturnya. Pronomina kita juga menimbulkan rasa egaliter karena menempatkan mitra tutur di posisi satu level dengan penutur dan jika digunakan pda konteks yang tepat dapat juga menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap penutur¹⁹.

Di era politik elektoral media, penggunaan bahasa mengalami pergeseran. Politisi begitu mengoptimalkan media sosial yang ada untuk memoles citra. Bahasa memegang peranan penting dalam pemolesan citra tersebut. *Personal branding* merupakan hal yang sangat penting dalam era ini. Bahasa menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mendapatkan dukungan publik. Bahasa digunakan untuk membangun reputasi dan kepercayaan publik. Bahasa dalam kondisi ini memang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai alat komunikasi dan penanda identitas. Fungsi ganda tersebut menjadikan para pemburu kekuasaan berupaya mengoptimalkan penggunaan bahasa dalam upayanya memperoleh kekuasaan. Bahasa dipelajari secara khusus untuk kepentingan kekuasaan. Bahasa politik memiliki kekhasan dan berbeda dengan bahasa akademik ataupun bahasa sastra. Tujuan bahasa politik tidak sekadar menyampaikan pesan melainkan menggerakkan publik untuk mengambil keputusan. Bahasa politik dalam padangan

¹⁹ Fathur Rokhman & Surahmat., hlm 150.

penulis adalah bahasa lapis ketiga, keempat, kelima dan bahkan tak berhingga. Dalam bahasa politik makna tidak dapat tidak bisa diperoleh hanya melalui simbol tuturan karena tersimpan di ruang terselubung. Intekstualitas dan kontekstualitas dapat mengubah makna sebuah tuturan hingga berbeda sekali dengan wujud aslinya. Budiyanto mengungkapkan bahwa bahasa politik di era politik elektoral harus memiliki tiga syarat yaitu informatif, partisipatif dan menggerakkan. Bahasa yang informatif digunakan untuk menyampaikan data dan konsep yang dimiliki seseorang atau partai politik kepada publik. Partisipatif maksudnya bahasa politik didesain untuk menimbulkan keterlibatan dari masyarakat. Dan pada saat yang sama bahasa politik juga harus mampu mendorong subjek politik untuk melakukan sesuatu²⁰.

Bahasa Dalam Transformasi Keindonesiaan

Indonesia awalnya hanya sebuah imajinasi. Menurut Doyin, Mukh, dan Wagiran (2012) penggunaan istilah Indonesia pertama kali muncul dari *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* (JIAEA) yang terbit pada 1847 di Singapura. Pengelola jurnal ini adalah James Richardson Logan. Dua tahun kemudian etnograf asal Inggris George Samuel Windsor Earl menulis artikel yang berjudul *On Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Poleynesian Nations*. Menurut Earl sudah saatnya penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Earl menggunakan nama sendiri. Ia mengajukan dua nama Indonesia dan Melayunesia. Logan dalam artikelnya *The Ethnology of the Indian Archipelago* menuliskan bahwa perlunya nama yang khas bagi kepulauan Hindia. Nama Indian Archipelago menurutnya terlalu panjang. Logan kemudian mengganti nama Indonesia yang diajukan Earl. Vokal “u” diganti menjadi “o” agar mudah diucapkan. Pada tahun 1884 guru besar etnologi University of Berlin menerbitkan buku *Indonesien: Order, die Inseln des Malayischen Archipel* yang memuat hasil penelitiannya mulai dari tahun 1864-1880. Berkat buku ini nama Indonesia menjadi populer di kalangan Sarjana Belanda. Meskipun pada

saat itu Indonesia hanya dipahami sebagai suatu kesatuan geografis, belum menjadi sebuah entitas bangsa yang hidup dalam komunitas kebangsaan yang memiliki identitas, cita-cita maupun kehendak.

R.M. Soewardi Soerjaningrat menggunakan penggunaan nama *Indonesische* sebagai kantor berita di Den Haag Belanda. Ia mendirikan kantor berita *Indonesische Persbureau* November 1913. Kantor berita tersebut menjadi alat propaganda dan alat perjuangan kaum pergerakan di Belanda. Buletin yang diterbitkan didistribusikan kepada anggota Senat (*Eerste Kamer*) dan Parlemen (*Tweede Kamer*), serta pengurus partai-partai sehingga mereka menyadari apa yang sedang terjadi di Hindia Belanda. Penggunaan nama *Indonesische* kemudian menginspirasi kaum pergerakan untuk turut menggunakannya. Pada tahun 1920an penggunaan Indonesia menjadi sebutan yang semakin populer. Muhammad Hatta pada tahun 1922 menawarkan agar nama Indonesia digunakan sebagai identitas negara yang menurutnya akan segera merdeka. Pada tahun 1924 Dr Sutomo mendirikan *Indonesische Studie Club*. Pada tahun yang sama Perserikatan Komunis Hindia Belanda mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. *Jong Islamieten Bond* membentuk kepanduan *National Indonesische Padvinderij*. Nama Indonesia semakin populer setelah deklarasi sumpah pemuda 1928²¹.

Indonesia sebagai imajinasi eksis pada pikiran dan angan-angan. Kemudian sekelompok orang membuat imajinasi tersebut menjadi sesuatu yang nyata dan hadir. Negara Indonesia merdeka bukan sesuatu yang tak bisa diwujudkan. Indonesia merdeka adalah sesuatu yang dapat dicapai. Pada 17 Agustus 1945 pada akhirnya Indonesia dapat memproklamkan kemerdekaannya. Salah satu usaha membangun kesadaran berbangsa dan bernegara adalah melalui bahasa. Indonesia adalah kata benda, kata sifat sekaligus kata benda. Sebagai kata benda Indonesia adalah wilayah dan bangsa. Sebagai kata kerja Indonesia adalah sebuah ikhtiar menjadi bangsa yang besar dan mandiri.

Ketika Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tahun 1916 membela pendidikan

²⁰ Fathur Rokhman & Surahmat., hlm 135-137.

²¹ Fathur Rokhman & Surahmat., hlm 81-84

bahasa melayu di sekolah, ia tidak memperoleh halangan dari pemerintahan kolonial. Bahasa Indonesia yang kemudian menjadi bahasa persatuan tidak dihalangi karena dianggap bertentangan dengan politik bahasa kolonial ketika itu. Pada tahun 1941 bahasa Melayu menjadi mata pelajaran wajib pada Sekolah Menengah Pertama (MULO) dan pada sekolah dagang. Jalan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa persatuan dan bahasa negara menjadi terbuka. Mulai 17 Agustus 1945 bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa teks proklamasi kemerdekaan dan selanjutnya digunakan untuk menuliskan undang-undang dasar 1945. Sejumlah kongres tentang bahasa kemudian diadakan secara teratur. Kongres bahasa pertama dilakukan pada tahun 1938. Secara politis Bahasa Indonesia memperoleh posisi yang sangat kuat dan strategis. Kekuatan bahasa Indonesia yang kuat dan strategis berlangsung terus hingga Orde Lama dan Orde Baru. Sejalan dengan kebijakan Orde Baru di bidang kebudayaan, maka kebijakan di bidang bahasa pun sangat sistematis dan intensif, baik di pusat maupun daerah.

Hoed, Widjojo, dan Noorsalim berargumen setidaknya ada tiga faktor yang terlibat dominan dalam kondisi tersebut. Pertama adanya peran pakar bahasa yang makin kuat dan menonjol bersamaan dengan makin banyaknya pakar bahasa. Kedua, berdirinya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (yang sebelumnya bernama Lembaga Bahasa Nasional) yang lebih dikenal dengan nama pusat bahasa. Di pusat bahasa para pakar melahirkan konsep-konsep yang mendasari kebijakan mengenai bahasa yang dikodifikasikan dalam bentuk buku Politik Bahasa Nasional (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1976). Meskipun tidak diundangkan, karena merupakan hasil dari praseminar (1974) dan kemudian seminar (1976) yang diikuti oleh pakar bahasa dan sastra serta pendidikan, maka pengaruhnya pada perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah sangatlah besar. Ketiga, perkembangan politik bahasa nasional yang menundukkan bahasa Indonesia pada tempat yang begitu utama sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa

resmi, bahasa pendidikan, dan bahasa dan ilmu pengetahuan dan teknologi.²²

Bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam transformasi keindonesiaan. Para pendiri bangsa seperti yang sudah disampaikan sebelumnya menggunakan beragam strategi kebahasaan agar tujuan perjuangan mereka tercapai. Melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober mereka menyatakan dengan lantang tanah air, bahasa, dan bangsa yang satu Indonesia. Secara historis peristiwa tersebut membentuk identitas kolektif kebangsaan Indonesia dan berefek panjang sampai saat ini.

Penutup

Pembahasan politik bahasa penguasa dalam buku ini menjadi sangat menarik untuk diskusikan secara lebih mendalam. Penulis menjelaskan secara detil bagaimana bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bagaimana bahasa beroperasi di berbagai arena dikaji oleh penulis dengan cermat. Kekuatan bahasa dapat dioptimalkan oleh pihak yang berkuasa untuk memuluskan niatannya. Bahasa dapat dimanfaatkan siapapun untuk memuluskan jalan menuju tujuannya. Bahasa digunakan para tiran untuk mendominasi masyarakat yang dikuasainya, digunakan para pejuang untuk melancarkan agenda perjuangan kemerdekaannya, digunakan beragam rezim untuk mempertahankan kuasanya, digunakan politisi untuk memuluskan langkah elektoralnya, pengusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, dan beragam aspek lainnya. Bahasa menjadi piranti penting bagi setiap aktivitas kehidupan manusia. Buku ini patut dibaca oleh mahasiswa, guru, dosen, peneliti maupun masyarakat umum yang berminat terhadap kajian mengenai politik bahasa di Indonesia.

Daftar Pustaka

Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia. 2003.

²² Muridan Wijoyo S. & Marsudi Noorsalim (editor), hlm. 13.

- Fansuri, Hamzah. *Sosiologi Indonesia: Diskursus Kekuasaan dan Reproduksi Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES. 2015.
- Haryatmoko. *Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia. 2010.
- Prastiti S, Savitri. *Keselarasan dan Kejanggalaan. Pemikiran-pemikiran Priyai Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan. 1985.
- Kridalaksana, Harimurti. *Bahasa dan Linguistik*, dalam Kushartanti; Yuwono Untung; Lauder Multamia RMT (Editor). *Pesona Linguistik, Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Penerbit Gramedia. 2007.
- Rokhman, Fathur & Surahmat. *Politik Bahasa Penguasa*. Jakarta: Kompas. 2016.
- Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2004.
- Vanliers, Lucien. *Memutus Rantai Kekerasan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2010.
- Wijoyo, Muridan S. & Noorsalim, Marsudi (editor). *Bahasa Negara versus Bahasa Gerakan Mahasiswa: Kajian Semiotik atas Teks-teks Pidato Presiden Soeharto dan Selebaran Gerakan Mahasiswa*. Jakarta: LIPI Press. 2004.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui aisahputrib@gmail.com.

Wasisto Raharjo Jati

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2012, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi tentang Politik Kelas, Kelas Menengah, Ekonomi-Politik, dan Gerakan Politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Dina Fadiyah

Penulis adalah staf pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Telah menyelesaikan S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Email: dinafadiyah@hotmail.com

Septi Satriani

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Lokal, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia memperoleh Gelar Sarjana dari Ilmu Politik Universitas Gajah Mada pada tahun 1999 dan Gelar Master dari Ilmu Antropoloti Universitas Gajah Mada pada tahun 2015. Ia menekuni studi politik lokal, politik sumber daya alam, dan studi konflik. Penulis dapat dihubungi melalui: septisatriani@gmail.com.

Siswanto

Penulis kelahiran Jakarta ini menamatkan S1 pada Fakultas Sospol jurusan Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 1986. Selanjutnya mengikuti Program Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, dan lulus tahun 1997. Gelar doctor diraih pada Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, pada tahun 2008. Sejak 1999 menjadi peneliti P2P-LIPI untuk menjabat Kepala Bidang Perkembangan Eropa. Sebagian besar karya ilmiah dan tulisannya membahas tentang kebijakan luar negeri AS dan hubungan Indonesia-AS. Sejak tahun 2008 sampai sekarang menjadi dosen tamu pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui sish_jakarta@yahoo.com.

Sandy Nur Ikfal Raharjo

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Indonesia. Gelar S2 diperoleh dari Universitas Pertahanan dengan tema Resolusi Konflik. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: sandy.raharjo@gmail.com.

Anggi Afriansyah

Lahir di Bekasi, 17 April 1987. Setelah menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta (2010), ia kemudian melanjutkan studi di Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia (2014). Pernah menjadi guru di SMAI Al Izhar, Pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Terbuka, Akademi Kebidanan Prima Indonesia, dan STKIP Kusuma Negara, juga pernah menjadi staf di Unit Implementasi Kurikulum (UIK) Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Saat ini merupakan Peneliti Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Anggi Afriansyah memiliki fokus kajian sosiologi pendidikan. Aktif menulis di media cetak maupun *online*. Beberapa tulisannya sudah dimuat di Koran Berita Cianjur, Jawa Pos, Koran Jakarta, Media Indonesia, Harian Republika, Lampung *Post*, Radar Bangka, Radar Tasikmalaya, Padang Ekspres, NU Online, dan gusdurian.net. Dapat dihubungi melalui afriansyah.anggi@gmail.com.

PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

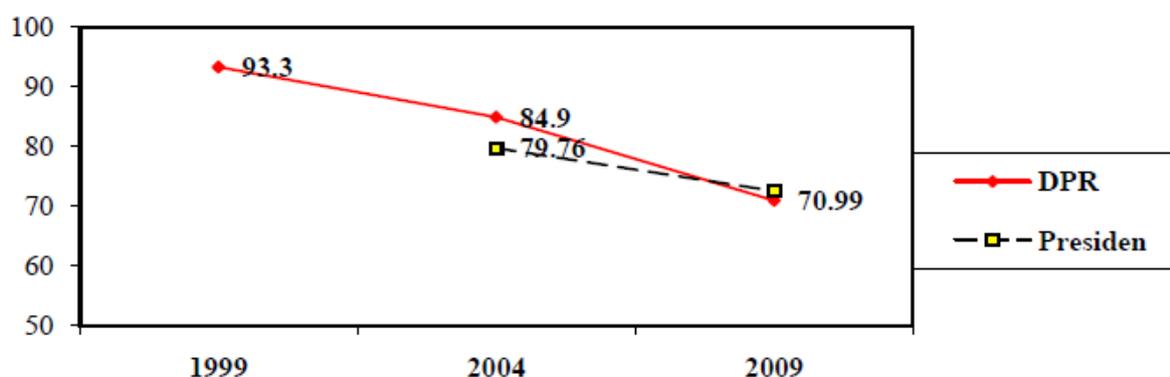
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

Tabel 1. Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah Sosialisasi agenda politik	Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Grafik 2. Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:
Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
 - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:
Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
 - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:
Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan.2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M.Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

c. Format rujukan dari laporan dan makalah:

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institute.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

d. Format rujukan dari surat kabar dan website

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

11. Pengiriman Artikel:

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi (penerbitan.p2p@gmail.com).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Fax. (021) 520 7118

13. Langganan:

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

